

Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Bahari: Studi Kasus Kabupaten Buton Selatan

Hensroni Rompas¹, Jamaluddin Hos²

¹ Universitas Halu Oleo

² Universitas Halu Oleo

rompas088@gmail.com, jamaluddin_hos@uho.ac.id

Abstract: The development of marine tourism is one of the important strategies to promote the development of coastal regions. The success of marine tourism development largely depends on the level of involvement and empowerment of local communities. This study aims to analyze local community empowerment in the development of marine tourism in South Buton Regency. This research employed a qualitative approach with a case study design. Primary data were collected through in-depth interviews with key officials of the South Buton Regency Tourism Office, while secondary data were obtained from regional planning documents and tourism-related reports. Data were analyzed using thematic analysis to identify forms of community empowerment, institutional roles, and challenges in marine tourism development. The findings indicate that community empowerment is implemented through the establishment and strengthening of Tourism Awareness Groups (Kelompok Sadar Wisata), the development of tourism villages, and the facilitation of tourism-based micro-enterprises. These empowerment efforts contribute to increased community participation and the development of marine tourism destinations, although they continue to face challenges related to limited infrastructure and suboptimal economic contributions. This study is expected to provide policy implications for strengthening community-based marine tourism development in coastal areas.

Keywords: community empowerment; maritime tourism; coastal communities; tourism development; south buton regency.

Abstrak: Pengembangan pariwisata bahari merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan wilayah pesisir. Keberhasilan pengembangan pariwisata bahari sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat kunci Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan daerah dan laporan kepariwisataan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi bentuk pemberdayaan masyarakat, peran kelembagaan, serta tantangan dalam pengembangan pariwisata bahari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan desa wisata, serta fasilitasi usaha mikro berbasis pariwisata. Pemberdayaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan destinasi wisata bahari, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan kontribusi ekonomi yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat di daerah pesisir.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat; pariwisata bahari; masyarakat pesisir; pengembangan pariwisata; Kabupaten Buton Selatan.

Article History:

Received 25-11-2025; Revised 27-12-2025; Accepted 03-01-2026

PENDAHULUAN

Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pesisir melalui pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan identitas budaya lokal, serta pelestarian lingkungan pesisir. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pariwisata bahari dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir apabila dikelola secara inklusif dan partisipatif (Hall, 2019; Bramwell & Lane, 2019).

Namun demikian, pengembangan pariwisata bahari di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait dengan keterlibatan masyarakat lokal. Praktik pengembangan pariwisata yang bersifat *top-down* dan didominasi oleh aktor eksternal seringkali menyebabkan masyarakat lokal hanya berperan sebagai penerima dampak, bukan sebagai aktor utama pembangunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, melemahkan kelembagaan lokal, serta mengancam keberlanjutan sosial dan lingkungan destinasi wisata pesisir (Nunkoo, 2017; Scheyvens & Biddulph, 2018).

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi elemen kunci dalam pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Dalam konteks pariwisata, pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan potensi pariwisata di wilayahnya. Scheyvens (1999) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata mencakup dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan politik, yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat langsung sekaligus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan lokal.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata bahari yang berkembang adalah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini memiliki beragam destinasi wisata bahari yang mengandalkan keindahan alam pesisir, ekosistem laut, serta budaya dan kearifan lokal masyarakat. Pemerintah daerah telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan dan mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Meskipun demikian, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan masih relatif terbatas, terutama yang secara khusus menelaah peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memperkuat

kapasitas kelembagaan masyarakat. Sebagian besar penelitian pariwisata di Indonesia lebih banyak berfokus pada destinasi yang telah berkembang atau menempatkan masyarakat semata sebagai informan utama, sementara analisis mengenai bagaimana kebijakan dan tata kelola pemerintah daerah membentuk ruang pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan yang sedang berkembang masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan koordinator pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pariwisata bahari berbasis masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep sentral dalam pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Dalam konteks pariwisata, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat pariwisata.

Scheyvens (1999) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata mencakup empat dimensi utama, yaitu pemberdayaan ekonomi, sosial, psikologis, dan politik. Pemberdayaan ekonomi tercermin dari meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat lokal, sementara pemberdayaan sosial berkaitan dengan penguatan kohesi sosial dan kelembagaan masyarakat. Pemberdayaan psikologis ditunjukkan oleh meningkatnya rasa bangga dan kepercayaan diri masyarakat terhadap identitas dan sumber daya lokal, sedangkan pemberdayaan politik merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.

Ife (2013) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Partisipasi dipahami tidak hanya sebagai keterlibatan fisik dalam kegiatan pariwisata, tetapi juga sebagai proses pemberian ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan dan pengelolaan pembangunan. Dalam konteks pariwisata, tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemberdayaan benar-benar terjadi secara substantif.

PARIWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT

Pariwisata bahari merupakan bentuk pariwisata yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir sebagai daya tarik utama, termasuk bentang alam pantai, ekosistem laut, serta aktivitas sosial-budaya masyarakat pesisir. Pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan menuntut pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi,

sosial, dan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan degradasi ekosistem pesisir maupun marginalisasi masyarakat lokal.

Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata (Giampiccoli & Mtapuri, 2017; Dangi & Jamal, 2016). Dalam pendekatan ini, masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya lokal dan distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pariwisata bahari berbasis masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, serta diversifikasi sumber pendapatan (Giampiccoli & Mtapuri, 2020; Rasoolimanesh et al., 2017).

Namun demikian, efektivitas pariwisata bahari berbasis masyarakat sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan lokal. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai dan penguatan organisasi masyarakat, pariwisata berbasis masyarakat berpotensi bersifat simbolik dan tidak menghasilkan pemberdayaan yang substantif (Zapata et al., 2019; Waligo et al., 2015).

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta menciptakan iklim kelembagaan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pariwisata (Hall, 2019; Jamal & Getz, 2016).

Salah satu instrumen kebijakan yang umum digunakan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pariwisata adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berfungsi sebagai wadah organisasi masyarakat yang berperan dalam pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas pelayanan wisata, serta promosi potensi wisata lokal. Melalui penguatan kapasitas Pokdarwis, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata sangat ditentukan oleh keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak seharusnya menjadi aktor dominan, melainkan berperan dalam menciptakan ruang partisipasi dan mendukung kemandirian kelembagaan masyarakat lokal (Ife, 2013; Scheyvens & Biddulph, 2018). Dengan demikian, analisis terhadap peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan dan praktik tata kelola pariwisata mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan. Pendekatan

kualitatif dipilih karena mampu menggali proses, kebijakan, serta dinamika kelembagaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks sosial dan wilayah yang spesifik. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan kepulauan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan potensi pariwisata bahari yang terus berkembang. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan dan praktik pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari, khususnya melalui peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, seperti desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kebijakan pariwisata daerah. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria keterlibatan langsung dalam program pengembangan pariwisata bahari serta pemahaman terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan daerah, laporan dinas terkait, data statistik pariwisata, serta peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata bahari.

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sebagai instrumen utama, yang didukung oleh pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah. Data hasil wawancara dicatat dan ditranskripsikan untuk keperluan analisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan bentuk pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah daerah, serta tantangan dalam pengembangan pariwisata bahari. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan kebijakan yang relevan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena fokus data primer lebih menekankan pada perspektif pemerintah daerah. Namun, keterbatasan ini merupakan bagian dari desain penelitian yang secara sadar menempatkan pemerintah daerah sebagai unit analisis utama dalam memahami praktik pemberdayaan masyarakat pariwisata bahari di wilayah kepulauan yang sedang berkembang. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melibatkan masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan dilakukan melalui pendekatan kelembagaan dan partisipatif yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata. Bentuk utama pemberdayaan diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan manfaat ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat lokal. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian mutakhir yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan (Hampton & Jeyacheya, 2020; Scheyvens & Biddulph, 2018; Analuddin et al., 2024).

Keterlibatan masyarakat melalui Pokdarwis memberikan ruang partisipasi dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, dan promosi potensi lokal. Hal ini mencerminkan praktik pemberdayaan yang sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menekankan peningkatan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Temuan ini menguatkan penelitian Boley et al. (2017) dan Hampton dan Jeyacheya (2020) yang menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi wisata.

Pengembangan desa wisata berbasis potensi pesisir dan budaya lokal memperkuat identitas lokal serta membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam rantai nilai pariwisata. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat di Buton Selatan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis sebagaimana dikemukakan oleh Scheyvens (1999) yang menekankan pentingnya pemberdayaan sosial dan psikologis dalam pariwisata, terutama melalui peningkatan rasa bangga dan kepemilikan terhadap sumber daya lokal. Selain itu, kebijakan pariwisata yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan terbukti mampu memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan destinasi wisata pesisir, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UNWTO, 2022; Hall, 2019).

PERAN POKDARWIS DAN KELEMBAGAAN LOKAL

Pokdarwis memiliki peran strategis sebagai aktor kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi, pemeliharaan lingkungan wisata, serta pelaksanaan kegiatan promosi. Keberadaan Pokdarwis menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan praktik pengelolaan pariwisata di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya variasi kapasitas kelembagaan Pokdarwis antar wilayah. Sebagian Pokdarwis telah mampu menjalankan fungsi organisasi secara relatif mandiri, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada pendampingan pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, akses pendanaan, serta intensitas pelatihan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas peran Pokdarwis. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan kelembagaan masyarakat memerlukan proses jangka panjang dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai fasilitator dan koordinator, bukan sebagai aktor dominan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ife (2013) yang menegaskan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan berbasis komunitas adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang secara mandiri. Dengan demikian, efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata bahari sangat ditentukan oleh keseimbangan antara intervensi pemerintah dan kemandirian kelembagaan masyarakat lokal.

DAMPAK PEMBERDAYAAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI

Pemberdayaan masyarakat lokal memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata. Salah satu indikator perkembangan pariwisata bahari dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan selama periode 2021–2024.

Table 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2024 (Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2025)

No	Tahun	Jumlah Seluruh Kunjungan
1	2021	46.744
2	2022	64.841
3	2023	118.271
4	2024	168.271

Data tersebut menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan, yang mengindikasikan meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya pengembangan destinasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata melalui Pokdarwis dan desa wisata. Keterlibatan masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan dan pengalaman wisatawan. Tetapi peningkatan kunjungan wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila integrasi masyarakat dalam rantai nilai pariwisata belum optimal (Hampton & Jeyacheya, 2020; UNWTO, 2022).

Oleh karena itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat masih bersifat terbatas dan lebih terkonsentrasi pada usaha mikro tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata bahari tidak dapat diukur semata-mata dari peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal terintegrasi secara aktif dalam rantai nilai pariwisata. Dengan demikian, kualitas pemberdayaan menjadi faktor kunci dalam memastikan dampak ekonomi yang lebih inklusif.

TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PARIWISATA BAHARI

Meskipun pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas, fasilitas umum, dan sarana penunjang destinasi, menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing pariwisata bahari.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal dalam bidang pelayanan wisata, manajemen destinasi, dan pemasaran masih menjadi tantangan signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya program pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan dinamika industri pariwisata. Tantangan lainnya adalah optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, yang menjadi prasyarat penting bagi penguatan tata kelola pariwisata bahari berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Buton Selatan sangat ditentukan oleh tingkat pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Temuan utama penelitian mengungkap bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, yang difasilitasi oleh peran pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, mampu meningkatkan kesadaran kolektif, partisipasi sosial, serta peluang ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur pendukung pariwisata, serta lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pariwisata bahari berbasis masyarakat (*community-based marine tourism*) dengan menghadirkan bukti empiris dari konteks wilayah kepulauan kecil. Hasil penelitian ini memperkuat perspektif bahwa keberhasilan pariwisata bahari tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan lokal dan pola relasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan kolaboratif yang kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik sosial wilayah maritim.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian yang bersifat kualitatif dan terbatas pada wilayah Kabupaten Buton Selatan menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi pariwisata bahari terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga analisis yang dihasilkan masih bersifat deskriptif dan eksploratif.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi perumusan kebijakan pengembangan pariwisata bahari, khususnya dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan infrastruktur pendukung yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang lebih terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan informan yang lebih beragam, termasuk pelaku usaha wisata dan komunitas lokal secara langsung, serta menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada perbandingan antarwilayah pesisir guna memperoleh model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari yang lebih aplikatif dan replikatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan atas dukungan data, informasi, dan fasilitasi selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berharga bagi kelancaran penelitian ini. Selain itu, penulis mengapresiasi Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo atas dukungan akademik dan fasilitas yang mendukung penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

Referensi

- Analuddin, K., Supriatna, J., & Prasetyo, L. B. (2024). Community-based marine tourism development and coastal sustainability in eastern Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 247, 106923. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106923>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Buton Selatan dalam angka 2023. BPS Kabupaten Buton Selatan.
- Bappenas. (2017). Kajian strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementerian PPN/Bappenas.
- Boley, B. B., McGehee, N. G., & Tom Hammett, A. L. (2017). Importance–performance analysis of resident tourism empowerment. *Tourism Management*, 58, 54–63.

- Bramwell, B., & Lane, B. (2019). Tourism governance and sustainable development: A critical review. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 981–1001. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1581884>
- Brenner, L., & Job, H. (2018). Challenges to actor-oriented environmental governance in tourism destinations. *Tourism Geographies*, 20(4), 678–699. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1378346>
- Chamidah, N., Guntoro, B., & Suryanto, P. (2020). Empowering coastal communities through marine tourism development. *Journal of Coastal Conservation*, 24(3), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11852-020-00754-8>
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An integrated approach to sustainable community-based tourism. *Sustainability*, 8(5), 475. <https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Ferguson, L., & Moreno, D. (2019). Gender and sustainable tourism: Reflections on theory and practice. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(6), 907–921. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1589513>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2017). Community-based tourism: An exploration of the concept(s). *Tourism Review*, 72(2), 203–215. <https://doi.org/10.1108/TR-01-2016-0002>
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism: An exploration of the concept(s) from a political perspective. *Tourism Review International*, 24(2–3), 95–107.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2016). Community-based tourism: A success? Institute of Responsible Tourism (ICRT) Occasional Paper No. 11.
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and tourism policy. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2020). Tourism and inclusive growth in small island developing states. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(6), 908–929. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1707212>
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Izzati, N., Nugroho, I., & Syarifuddin, D. (2020). Coastal tourism development and community empowerment in Indonesia. *Tourism Planning & Development*, 17(3), 335–352. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1688255>
- Jamal, T., & Getz, D. (2016). Tourism governance and policy. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(4), 565–583. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1117358>
- Jones, P. J. S., De Santo, E. M., Qiu, W., & Vestergaard, O. (2016). Introduction: An empirical framework for marine protected area governance. *Marine Policy*, 41, 91–100. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.12.003>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020–2024*. Kemenparekraf RI.
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Market segmentation based on the environment-friendly behavior of ecotourists. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(8), 1224–1244. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1599005>

- Manyara, G., & Jones, E. (2017). Community-based tourism enterprises development in Kenya. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(3), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1199299>
- Marine, A., & Tompkins, E. (2018). Coastal community resilience and tourism development. *Ocean & Coastal Management*, 163, 128–137. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.06.003>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust? *Tourism Management*, 61, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.12.010>
- Okazaki, E. (2018). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions. *Tourism Management*, 60, 147–158. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.020>
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245–249.
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609. <https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1381985>
- Spalding, M., Burke, L., Wood, S. A., Ashpole, J., Hutchison, J., & zu Ermgassen, P. (2017). Mapping the global value and distribution of coral reef tourism. *Marine Policy*, 82, 104–113. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.014>
- Stone, M. T., & Nyaupane, G. P. (2018). Protected areas, tourism and community livelihoods. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(2), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1343690>
- Su, L., Huang, S., & Pearce, J. (2018). Toward a model of destination social responsibility. *Journal of Travel Research*, 57(3), 1–15. <https://doi.org/10.1177/0047287517697840>
- Su, M. M., Wall, G., Wang, Y., & Jin, M. (2019). Livelihood sustainability in a rural tourism destination. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1028–1048.
- Suansri, P., & Yee, M. (2019). Community-based tourism development and community empowerment in coastal areas. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 17(5), 1–15.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- UNWTO. (2022). *Tourism and coastal sustainability*. World Tourism Organization.
- Waligo, V. M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2015). Implementing sustainable tourism. *Tourism Management*, 46, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.013>
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.

TheJournalish: Social and Government

Vol. 7 No. 1 (2026): Social and Government

Zapata, M. J., Hall, C. M., Lindo, P., & Vanderschaeghe, M. (2019). Can community-based tourism contribute to development? *Tourism Management*, 70, 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.003>